



YUSTITIA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NGURAH RAI

PERLINDUNGAN HUKUM HAK DESAIN INDUSTRI KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP PENGRAJIN SONGKET BALI DI KLUNGKUNG, SEMARAPURA

Oleh:

¹Kadek Frediandrika Adnantara
Fakultas Hukum, Universitas Mahendradatta
(frediandrikastrong@gmail.com)

ABSTRAK

Perlindungan kekayaan intelektual adalah memberikan perlindungan hukum atas kepemilikan hak kekayaan intelektual publik dan swasta, yang merupakan dasar dari perkembangan ekonomi kreatif dan memberikan kontribusi penting bagi pembangunan negara. Sebagai negara berkembang, Indonesia harus mampu mengambil langkah yang tepat untuk mengantisipasi segala perubahan dan perkembangan serta tren global guna mencapai tujuan nasional.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual untuk Hak Industri kain songket di Desa Klungkung Bali dan untuk mengetahui Pendaftaran Hak atas Kekayaan Intelektual terhadap Hak Industri kain songket.

Metode penelitian yang digunakan adalah secara legal empiris, yaitu melalui penggunaan hukum- hukum yang ditinjau dari norma – norma atau Simfoni Dassault dan realitas sosial, budaya, atau Dassian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kain songket Bali dapat memperoleh Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Desain Industri.

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan Hukum, Hak Desain Industri

ABSTRACT

Intellectual property protection is to provide legal protection for the ownership of public and private intellectual property rights, which is the basis of the development of the creative economy and makes an important contribution to the development of the country.

1 Muhammad, Abdulkadir, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

As a developing country, Indonesia must be able to take appropriate steps to anticipate all changes and developments as well as global trends in order to achieve national goals. The purpose of this study is to determine the protection of Intellectual Property Rights for Songket Fabric Industrial Rights in Klungkung Village Bali and to find out the Registration of Intellectual Property Rights for Songket

Fabric Industrial Rights The research method used is legally empirical, namely through the use of laws in terms of norms or Dassault Symphony and social reality, cultural, or Dassian. The results showed that Balinese songket cloth can obtain Intellectual Property Rights, especially Industrial Design Rights.

Keywords: *Intellectual Property Rights, Legal Protection, Industrial Design Rights*

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi inovatif merupakan salah satu pilar utama Indonesia dan berbagai negara, dan merupakan perkembangan industri yang pesat dalam songket yang ada di Bali dan maka ada baiknya para pelaku usaha harus mulai mengetahui tentang aturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia.¹ Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memberikan hak eksklusif kepada pemilik hak untuk menggunakan kreasi atau penemuan mereka untuk jangka waktu tertentu. Hak kekayaan intelektual (HKI) terbagi menjadi dua kategori, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan – pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta secara khusus diberikan kepada pencipta, yang memiliki hak eksklusif untuk mempublikasikan atau menyalin ciptaan mereka. Hak cipta yang terlibat adalah hak milik cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.² Hak milik industri mempunyai dasar hukum yang cakupannya luas berikut adalah beberapa diantaranya yaitu³ :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, berisi tentang investor dan juga pemegang hak paten.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, berisi tentang merek, merek dagang, merek jasa, merek kolektif, dan jangka waktu perlindungan terhadap merek dan Indikasi Geografis.
3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, berisi tentang desain industri, dan jangka waktu perlindungannya.
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, berisi tentang desain tata letak, dan juga sirkuit terpadu.
5. Undang-undang 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, berisi tentang rahasia dagang, lingkup rahasia dagang, dan juga perlindungan terhadap rahasia dagang.

yang diberi kuasa, sebagai berikut yakni :

1. Mendaftar melalui Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM (Kanwil Depkumham) hanya

1 Abdul Atsar, 2018, Mengenal Lebih dekat Hukum Kekayaan Intelektual, CV Budi Utama, Yogyakarta.

2 Muhamad Djumhana dan Djubadillah, 2014, Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

3 Kitab Undang – Undang Hak Atas Kekayaan Intelektual

berada di ibu kota provinsi. Pihak yang berada di luar wilayah ibu kota provinsi harus mendatangi langsung Kanwil Depkumham di provinsinya.

2. Mendaftar melalui situs online melalui situs resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Saat ini Ditjen Hak Kekayaan Intelektual telah menyediakan portal registrasi daring. Cara ini lebih cepat dan aman, karena langsung terhubung dengan Dirjen Kekayaan Intelektual pusat.

kemudian sampai saat ini belum memiliki Hak Kekayaan Intelektual dikarenakan tidak mengetahui maupun tidak memahami pada pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual dan kendalanya ialah ketika ada pihak pihak yang meniru maka akan mengakibatkan mereka tidak bisa protes untuk hal tersebut.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara – cara berpikir dan berbuat, yang dipersiapkan dengan baik untuk mengadakan penelitian dan guna mencapai tujuan. Dari uraian tersebut diatas dapat dipahami, bahwa penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan yang terencana dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru guna mendapatkan kebenaran ataupun ketidakbenaran dari suatu gejala yang ada. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris – normatif yaitu melakukan penelitian lapangan, melihat secara langsung dan melakukan wawancara kepada pihak terkait, responden, disamping melakukan penelitian Peraturan Perundang – Undangan, Peraturan terkait, literatur – literatur

Adapun penulis lakukan secara yuridis sosiologis, yaitu memadukan antara

peraturan perundang – undangan yang berlaku dengan kenyataan – kenyataan yang ada di masyarakat peraturan perundang – undangan yang berlaku. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Klungkung, Semarang.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interpretasi hukum dan konstruksi hukum yakni analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti. Setelah data analisis selanjutnya akan ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif yaitu suatu pola berpikir yang berdasarkan pada hal – hal bersifat umum, atau kemudian generalisasi atau kesimpulan yang bersifat khusus.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual terhadap Industri kain tenun songket Bali di Klungkung Semarang

Kain Songket Bali dikategorikan sebagai kerajinan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta, Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual hingga hak paten pada produk kain Songket Bali akan memelihara nilai budaya dan ekonomi daerah Pemberian Perlindungan Kekayaan Intelektual akan memastikan hak eksklusif bagi perajin kain Songket Bali untuk menghasilkan karya orisinal dan berkualitas Hak kekayaan intelektual terhadap kain Songket Bali akan menghambat praktik pembajakan dan penggunaan ilegal yang dapat merusak industri lokal dan Pengakuan Internasional atas Hak Kekayaan Intelektual pada kain Songket Bali akan meningkatkan citra budaya Indonesia dan menarik minat wisatawan di masa depan.⁴

4 Farah Annisa, 2019. Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia dan hukum Internasional. LEX PRIVATUM 6 (7).

Sanksi hukum bagi pelaku pembajakan kain songket Bali adalah Tindakan pembajakan kain songket Bali dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Sanksi pidana tersebut dapat berupa hukuman pidana penjara dan/atau denda bagi pelaku pembajakan Selain sanksi pidana, pelaku pembajakan kain songket Bali juga dapat dituntut untuk ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh pemilik hak cipta Pemerintah dapat melakukan tindakan administratif dengan menyita barang hasil pembajakan⁵ dan menindaklanjuti dengan proses peradilan Selain itu, tindakan pembajakan dapat merugikan industri lokal, sehingga pelaku pembajakan dapat dikenakan sanksi administratif atau dilarang beroperasi secara bisnis di masa depan.

Dampak dari Tindakan pembajakan terhadap industri lokal Tindakan pembajakan dapat mengurangi pendapatan perusahaan dan pekerja dalam industri lokal Kehilangan pendapatan dapat menghambat pertumbuhan industri, mengurangi produksi dan inovasi produksi, dan potensialnya mengakibatkan tutupnya perusahaan dan Tindakan pembajakan dapat merusak citra merek perusahaan dan produk, yang dapat mengurangi kepercayaan konsumen, pengaruh pemasaran, dan keuntungan perusahaan. Dampak jangka panjang tindakan pembajakan dapat menurunkan daya saing dan kondisi investasi di daerah tersebut, Tindakan pembajakan dapat melemahkan upaya perlindungan hak kekayaan intelektual dan hukum yang terkait, dan merugikan hak pemilik dalam inovasi, pengembangan.

Solusi alternatif untuk mempromosikan produk – produk lokal khususnya songket Bali agar tidak terjadi

pembajakan Menghasilkan inovasi atau kualitas produk yang lebih baik, sehingga mampu memenangkan persaingan di pasar domestik dan internasional Mempromosikan perlindungan hak kekayaan intelektual yang kuat dan melakukan tindakan hukum yang tegas terhadap pelaku pembajakan dan Penegakan standar kualitas dan pelabelan di produk lokal, misalnya dengan memberikan label halal, ramah lingkungan, dan sertifikat keaslian. Perluasan jaringan distribusi produk lokal, seperti dengan memanfaatkan layanan *e-commerce* dan berpartisipasi dalam acara pameran dan pasar tradisional Mengajak masyarakat⁶ untuk membudayakan produk lokal dan memberikan keunggulan dalam membuat, dan cara menjual.

Perlindungan hukum hak kekayaan intelektual terhadap industri kain songket bali, Kain Songket Bali dilindungi oleh undang-undang hak cipta sebagai warisan budaya dan karya seni nasional yang dilindungi di Indonesia, Pemerintah Indonesia dapat memberikan perlindungan hak kekayaan intelektual, seperti hak cipta, merek dagang, dan paten, kepada para perajin kain Songket Bali yang memproduksi karya orisinal Perlindungan hak kekayaan intelektual atas kain Songket Bali dapat memastikan hak eksklusif bagi perajin menghasilkan karya orisinal dan berkualitas dan Pemberian hak kekayaan intelektual juga dapat menghambat praktik pembajakan dan penggunaan ilegal yang dapat merusak industri lokal dan mendorong inovasi yang berkelanjutan, Pengakuan internasional atas hak kekayaan intelektual pada kain Songket Bali akan meningkatkan citra budaya Indonesia, menarik minat wisatawan, dan membantu melindungi dan memelihara warisan

5 Hery Firmansyah. 2018 Perlindungan Hukum terhadap Merek: panduan Memahami Dasar Hukum Penggunaan dan Perlindungan Merek. Media Presindo.

6 Subroto, Muhammad Ahkmad, dan Suprapedi, HKI (Hak kekayaan Intelektual) Konsep Dasar Kekayaan Intelektual untuk Penumbuhan Inovasi, PT Index, Jakarta, 2008.

budaya dan seni rakyat Indonesia.

Undang – Undang yang secara khusus melindungi kain tradisional di Indonesia Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta melindungi kain tradisional seperti Batik, Songket, Tenun, dan lainnya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis melindungi beberapa jenis kain tradisional Bali misalnya Kain Tenun Gringsing, kain tenun klungkung, kain tenun Karangasem, kain tenun Tabanan, kain tenun buleleng. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Desain Industri memberikan perlindungan kepada kain tradisional yang memiliki ciri khas dan keunikan desain Peraturan Daerah di beberapa provinsi seperti Bali khususnya juga memberikan perlindungan dan pengembangan kepada kain tradisional di wilayah tersebut. Undang-Undang Warisan Budaya Tak benda memberikan perlindungan terhadap warisan budaya tak benda, termasuk kain tradisional, melalui proses inventarisasi dan penetapan sebagai warisan budaya nasional.

Undang – undang tersebut efektif dalam melindungi kain tradisional songket Bali dari pembajakan Pelaksanaan undang-undang tersebut masih perlu ditingkatkan untuk memastikan efektivitas dalam melindungi kain tradisional dari pembajakan. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi efektivitasnya adalah Kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha dalam penerapan undang-undang tersebut masih rendah, Keterbatasan sumber daya manusia, teknis, dan finansial dalam penerapan undang-undang dan dalam melakukan pengawasan pelaksanaan undang-undang Tingkat pemahaman hukum yang masih rendah pada masyarakat dan para perajin kain tradisional, sehingga mereka cenderung tidak mengetahui perlunya perlindungan hak kekayaan intelektual dan cara penerapannya. Pelaksanaan pengawasan terhadap penjualan dan produksi kain

tradisional khususnya kain songket Bali yang memenuhi standar dan keaslian masih perlu ditingkatkan, Pengawasan terhadap praktik pembajakan kain tradisional masih kurang, sehingga perlu lebih ditingkatkan untuk menghindari terjadinya pembajakan. Meskipun masih banyak hal yang perlu ditingkatkan, tetap perlindungan hukum atas kain tradisional merupakan langkah penting dalam upaya menjaga keberlangsungan warisan budaya dan industri lokal.

Meningkatkan kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha dalam penerapan undang – undang hak kekayaan intelektual terhadap kain tradisional kain songket Bali Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat dan pelaku usaha terhadap pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual, baik melalui sosialisasi, pelatihan, dan Pendidikan dan Memperkuat pengawasan dan penegakan hukum secara ketat terhadap praktik pembajakan kain tradisional, dan memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku pembajakan, Meningkatkan akses perajin kain tradisional terhadap informasi, pelatihan, dan dukungan terkait hak kekayaan intelektual, seperti hak cipta, merek dagang, dan paten kepada masyarakat. Meningkatkan inovasi dan kualitas produk kain tradisional untuk meningkatkan daya saing dan meminimalkan praktik pembajakan Mendorong penggunaan teknologi digital untuk memberikan sertifikasi keaslian terhadap kain tradisional, sehingga dapat dengan mudah dilacak dan terhindar dari praktik pembajakan, Meningkatkan partisipasi masyarakat dan perajin kain tradisional dalam proses inventarisasi warisan budaya tak benda dan ikut serta dalam upaya pelestariannya Menyediakan bentuk insentif, seperti perizinan dan subsidi, untuk mendorong penerapan undang-undang hak kekayaan intelektual pada kain tradisional songket Bali.

Perlindungan hukum dapat diberikan kepada pelaku pengrajin kain songket Bali yang tidak bertanggungjawab atas pembajakan kain tersebut dengan cara Pelaku pengrajin dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap pelaku pembajakan sebagai pihak yang merugikan hak cipta dan kekayaan intelektual mereka, Pemerintah dapat mengambil tindakan hukum terhadap pelaku pembajakan dan memberikan bantuan hukum kepada pelaku pengrajin yang tidak mampu secara finansial untuk mengajukan gugatan. Dilakukan proses hukum yang cukup terhadap pelaku pembajakan, sehingga dapat mengurangi tindakan pembajakan di pasar⁷, Pelaku pengrajin dapat mendapatkan sertifikat keaslian (*Certificate of Authenticity*) dari lembaga resmi, yang memastikan bahwa produk kain Songket Bali tersebut benar-benar buatan mereka dan tidak ada unsur pembajakan di dalamnya. Peningkatan pendidikan dan sosialisasi tentang perlindungan hak kekayaan intelektual dan dampak positifnya pada pelaku pengrajin, sehingga mereka menghargai hak cipta dan menghindari tindakan pembajakan.

Pemerintah dapat mengambil Tindakan hukum terhadap pelaku pembajakan. Memberlakukan undang-undang hak kekayaan intelektual⁸ yang kuat dan tegas untuk melindungi hak cipta, merek dagang, dan paten kain Songket Bali, dan memberikan hukuman yang sesuai undang-undang yang berlaku terhadap pelaku pembajakan. Menginstruksikan aparat hukum untuk mengawasi dan melakukan pengawasan di pasar-pasar, toko-toko, dan platform online agar terhindar dari praktik pembajakan, Menyita dan menghancurkan produk kain Songket Bali buatan pelaku pembajakan serta mengadakan proses peradilan terhadap pelaku pembajakan dan

Menginformasikan masyarakat tentang konsekuensi hukum dan ekonomi dari pembajakan, termasuk mendorong publik dan konsumen untuk tidak membeli produk bajakan dan memberikan sanksi bagi pelaku pembajakan, Meningkatkan kerja sama dengan pihak lain, seperti pihak kepolisian dan perusahaan teknologi informasi, untuk mencegah dan mengatasi praktik pembajakan.

Beberapa kasus Tindakan hukum yang efektif dalam menangani pelaku pembajakan adalah:

1. Pada tahun 2018, pihak berwenang di Indonesia mengeksekusi 100 ton produk otentik di pasar tradisional Kota Denpasar, Bali yang diduga palsu, termasuk kain-kain tradisional seperti batik dan songket Bali.
2. Pada tahun 2019, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia membatalkan merek dagang produk-produk ilegal yang tidak memiliki izin dagang dari pemiliknya. Ada sebanyak 3.898 merek dagang yang dibatalkan, termasuk merek dagang produk kain yang sudah ditiru oleh pelaku pembajakan.

Dari kasus-kasus tersebut, terlihat bahwa tindakan hukum yang tegas dan pengawasan yang ketat dapat membuat efek jera pada para pelaku pembajakan dan memastikan perlindungan hak kekayaan intelektual.

Maka proses peradilan dalam menangani kasus pembajakan hak desain industri tradisional kain tenun Bali harus melalui pengadilan agar dapat mendapatkan perlindungan hukum, penegakkan hukum dan keadilan hukum

7 Abdul Bari Azed, *Kepentingan Negara Berkembang Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional*

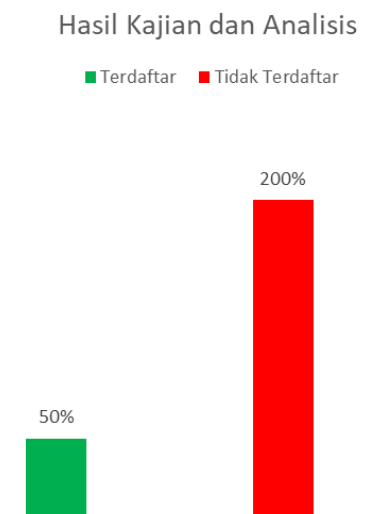
8 Budi Ahus Riswandi dan M sayamsuddin, *HKI dan Budaya Hukum PT*. radja Grafindo Persada Jakarta 2004

dengan proses Pengajuan gugatan oleh pemilik hak kekayaan intelektual yang dirugikan ke pengadilan negeri. Dalam hal ini, pemilik hak harus membuktikan bahwa dirinya telah memiliki hak atas desain industri tersebut, Pemeriksaan gugatan oleh pengadilan negeri untuk menentukan apakah klaim tersebut benar atau tidak. Pengadilan negeri juga akan meminta pelaku pembajakan untuk menjelaskan pandangannya terhadap klaim pemilik hak kekayaan intelektual. Apabila pengadilan negeri menetapkan bahwa klaim tersebut benar, maka pengadilan akan mengeluarkan putusan berupa pemutusan hubungan usaha dan/atau ganti rugi kepada pemilik hak kekayaan intelektual sebesar kerusakan yang diderita terdapat unsur pidana dalam kasus pembajakan ini, maka pemilik hak kekayaan intelektual dapat melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti sesuai dengan hukum pidana. pemilik hak kekayaan intelektual dapat mengajukan banding atas putusan pengadilan negeri ke pengadilan tinggi. Dalam menangani kasus pembajakan hak desain industri tradisional kain tenun Bali, penting untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan secara adil dan transparan serta perlindungan hak kekayaan intelektual terjaga dengan baik.⁹

Jika terdapat unsur pidana dalam kasus pembajakan hak desain industri tradisional kain tenun Bali, maka dapat dilakukan dengan Melaporkan kasus pembajakan kepada pihak berwenang, seperti kepolisian, agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan hukum pidana Setelah melaporkan kasus kepada pihak kepolisian, petugas akan melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti terkait kasus pembajakan tersebut Pihak kepolisian akan mengambil tindakan yang sesuai dengan hukum pidana, seperti penangkapan

tersangka, penyitaan barang bukti, dan lain sebagainya, Apabila terdapat cukup bukti untuk membuktikan pelaku pembajakan bersalah, maka kasus akan diteruskan ke pengadilan untuk diputuskan secara hukum. Pengadilan akan menentukan hukuman terhadap pelaku pembajakan yang bersalah, seperti hukuman penjara, denda, dan lain sebagainya. Dalam situasi apapun, tindakan pidana harus diambil sesuai dengan hukum yang berlaku dan memastikan bahwa perlindungan hak kekayaan intelektual terjaga dengan baik. Juga, penting untuk melibatkan aparat hukum yang benar-benar kompeten dan profesional untuk menangani kasus pembajakan tersebut.

Tabel. 1 Penelitian Analisis kain tenun songket Bali klungkung, Semarapura



3.2. Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual Desain Industri kain tenun songket Bali di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kain tenun songket Bali harus di daftarkan di kantor Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia di Bidang Kekayaan Intelektual (KI) dengan Prosudur Registrasi songket bali sebagai warisan budaya harus dilakukan ke Kementerian

9 Fadjar, A. Muktie. Perlindungan Hukum Unsur Esensial dalam Suatu Negara.

Hukum dan HAM, kain tenun songket Bali wajib didaftar ke Kementerian Hukum dan HAM sebagai perlindungan kekayaan budaya. Perlindungan kain tenun songket Bali sebagai bagian warisan budaya harus melalui pendaftaran di Kementerian Hukum dan HAM.¹⁰ Kain tenun songket Bali sebagai lambang warisan budaya perlu didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM sebagai upaya mempertahankan kesenian tradisional bangsa, Kain tenun songket Bali harus didaftarkan sebagai produk warisan budaya yang dilindungi Kementerian Hukum dan HAM.

Manfaat dari pendaftaran kain tenun songket Bali sebagai warisan budaya adalah Pendaftaran kain tenun songket Bali sebagai warisan budaya dapat memudahkan pengakuan secara resmi dari Pemerintah Indonesia bahwa kain tenun songket Bali adalah bagian dari kekayaan budaya bangsa dan perlu dilindungi dan dijaga. Kain tenun songket Bali sebagai warisan budaya dapat meningkatkan keaslian dan kualitas produksi sehingga daya jual produk semakin meningkat.¹¹ Dengan pendaftaran kain tenun songket Bali sebagai warisan budaya secara resmi, maka masyarakat dapat diarahkan untuk merangkul dan melestarikan kekayaan budaya tersebut sebagai sumber daya ekonomi dan budaya yang berkelanjutan, kain tenun songket Bali sebagai warisan budaya dapat memotivasi masyarakat Bali untuk merawat budaya lokal demi mempertahankan identitas dan ciri khas bangsa Indonesia. Dengan pendaftaran kain tenun songket Bali menjadi warisan budaya, maka pemerintah dapat memberikan perlindungan hukum atas hak cipta, penggunaan merek, dan

penggunaan paten atas produk tersebut.

Langkah selanjutnya setelah kain tenun songket Bali terdaftar sebagai warisan budaya sebagai warisan budaya, pihak terkait harus membangun kesadaran masyarakat Bali akan pentingnya menjaga kelestarian kain tenun songket Bali serta mengembangkan potensi desain dan teknik produksi yang sesuai dengan nilai budaya.¹² Pemerintah dan masyarakat Bali perlu memiliki rencana aksi untuk melestarikan, mempromosikan, mengembangkan, serta meningkatkan kualitas dan nilai ekonomi kain tenun songket Bali sebagai warisan budaya, Pemerintah dapat memberikan perlindungan hukum dan dukungan keuangan pada para pelaku usaha di bidang produksi, perdagangan, dan promosi kain tenun songket Bali. Pemerintah dan masyarakat Bali perlu menggalakkan sosialisasi dan edukasi tentang kain tenun songket Bali sebagai warisan budaya agar dapat menumbuhkan kesadaran dan kepedulian yang luas pada masyarakat Indonesia dan dunia terhadap keberadaan warisan budaya Indonesia. Terus melakukan inovasi dan kreativitas untuk kain tenun songket Bali dalam menjaga nilai tradisional dan memenuhi kebutuhan pasar yang semakin modern dan global.

Maka akan bisa di produksi sampai ke negara – negara Internasional kain tenun songket Bali yang bisa di pameran di pameran – pameran nasional maupun internasional dengan cara Mengikuti pameran-pameran seni dan budaya internasional, seperti World Craft Council, World Batik Summit, dan berbagai pameran industri kreatif yang berkaitan dengan fashion atau tekstil di luar negeri.

10 Pangkalan Data Kekayaan Intelektual, 2024, Diakses Pada Tanggal 27 Maret 2024, <https://pdkiindonesia.dgip.go.id/detail/P00199600554?type=patent&keyword>

11 <https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel/bali-catatkan-kain-endek-dan-songket-sebagai-kekayaan-intelektual-komunal?kategori=ki-komunal> diakses pada tanggal 27 Maret 2024

12 <https://diskominfos.baliprov.go.id/workshop-pelestarian-kain-tenun-dan-songket-bali/> diakses pada tanggal 27 Maret 2024

Merintis kerjasama dengan pelaku usaha di luar negeri, seperti pemasok bahan baku tekstil, desainer fashion, maupun produsen kosmetik yang menggunakan motif songket Bali pada produknya. Menggandeng perusahaan e-commerce besar untuk memasarkan produk kain tenun songket Bali secara online ke pasar internasional. Membuka gerai atau toko di beberapa negara tujuan ekspor yang strategis, seperti Jepang, Inggris, Belanda, AS, dan China. Membuat program studi tentang songket Bali di lembaga pendidikan di luar negeri, seperti universitas yang memiliki fakultas desain atau fashion, sehingga dapat mengenalkan kain tenun songket Bali pada dunia akademik internasional dan mendapatkan pengakuan atas nilai budayanya.

Beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam kualitas dan kuantitas kain tenun songket Bali adalah mempertahankan kualitas kain tenun songket Bali agar tetap terjaga dan Menerapkan standar produksi yang baik dan memperhatikan kualitas benang, warna, dan corak (motif) kain tenun songket Bali agar terjaga konsistensinya, Menggunakan bahan baku yang berkualitas tinggi dan bahan kimia yang ramah lingkungan untuk produksi kain tenun songket Bali agar terjaga kualitas dan keamanannya, Melakukan proses *quality control* secara berkala pada produk kain tenun songket Bali sehingga dapat teridentifikasi kerusakan atau kecacatan pada produk sebelum dikirim untuk ekspor. Mengikuti berbagai sertifikasi dan standarisasi kualitas internasional untuk produk tekstil/kain, seperti SNI, Oeko-Tex Standard 100, International Organization for Standardization (ISO), sehingga dapat

meningkatkan kepercayaan pelanggan dan mengamankan pasar ekspor luar negeri.¹³

Pendaftaran desain industri di Kementerian Hukum dan HAM dapat memberikan perlindungan hukum kepada pemilik desain industri dari tindakan pelanggaran atau pencurian kekayaan intelektual. Mengajukan pendaftaran desain industri di Kementerian Hukum dan HAM¹⁴ dapat membantu mendorong inovasi dan kreativitas dalam industri sehingga dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia secara umum. Pendaftaran desain industri di Kementerian Hukum dan HAM dapat memberikan kepastian hukum kepada pemilik desain industri mengenai hak kepemilikan dan perlindungan kekayaan intelektual yang dimilikinya. Dengan didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM, desain industri Indonesia dapat lebih terlihat dan dikenal di dalam maupun luar negeri dan memperkuat citra positif industri kreatif Indonesia. Pendaftaran desain industri di Kementerian Hukum dan HAM juga bisa menjadi salah satu syarat penting dalam pengajuan paten atau merek dagang sehingga dapat menjadi nilai tambah bagi pemilik desain industri.

Mendaftar desain industri di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bidang Kekayaan Intelektual. Melakukan pemeriksaan terlebih dahulu apakah desain yang akan didaftarkan telah memenuhi syarat formal dan substansial untuk didaftarkan,¹⁵ baik dari segi keaslian, kebaruan, atau kegunaan. Mengisi formulir permohonan pendaftaran desain industri di Kementerian Hukum dan HAM yang dapat diunduh dari situs resmi Kementerian Hukum dan HAM, Melampirkan dokumen pendukung, seperti gambar

13 <https://www.tenunbali.com/link/4-cara-bagaimana-melihat-kualitas-kain-tenun-yang-asli.html> diakses pada tanggal 27 Maret 2024

14 <https://bpsdm-dev.kemenkumham.go.id/informasi-publik/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/kekayaan-intelektual-desain-industri> diakses pada tanggal 28 Maret 2024

15 <https://dgip.go.id/menu-utama/desain-industri/syarat-prosedur> diakses pada tanggal 28 Maret 2024

desain, spesifikasi teknis produk, dan data pemohon yang sah, Membayar biaya pendaftaran berdasarkan kelompok desain dan status pemilik desain apakah individu atau perusahaan. Setelah pengajuan permohonan, pemohon akan menerima nomor pengajuan dan proses pemeriksaan permohonan dari Kementerian Hukum dan HAM. Permohonan dapat diterima, ditolak atau memerlukan perbaikan dari pemohon sebelum akhirnya diberikan sertifikat desain industri jika permohonan disetujui.

Proses pendaftaran desain industri di Kementerian Hukum dan HAM bidang kekayaan intelektual memerlukan waktu yang cukup lama, biasanya memakan waktu 12-18 bulan. Namun, waktu ini dapat bervariasi tergantung pada jumlah permohonan pendaftaran yang sedang diproses dan kualitas dokumen dan gambar desain yang dilampirkan oleh pemohon. Oleh karena itu, disarankan untuk pemohon agar melakukan pemenuhan persyaratan dengan tepat dan teliti sehingga permohonan dapat segera diproses dan mendapatkan izin bagi pemilik desain industri untuk membuat dan memproduksi desain tersebut secara legal.

Jika pemohon kurang paham atau tidak yakin mengenai spesifikasi teknis produk yang harus diisi, sebaiknya meminta bantuan konsultan atau ahli yang terpercaya di bidangnya atau langsung tanyakan kepada Kementerian Hukum dan HAM bidang Kekayaan Intelektual, untuk membantu mempersiapkan dokumen spesifikasi teknis produk agar sesuai dengan persyaratan pendaftaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pemohon juga dapat menanyakan kepada Kementerian Hukum dan HAM mengenai persyaratan teknis dan dokumen yang harus dilampirkan agar permohonannya dapat diproses. Kementerian Hukum dan HAM biasanya menyediakan layanan informasi

dan konsultasi terkait hak kekayaan intelektual, termasuk pendaftaran desain industri. Pemohon harus memastikan bahwa semua informasi dan dokumen yang diajukan benar dan akurat agar permohonan pendaftaran desain industri dapat diproses secara tepat waktu dan mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal.

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memiliki layanan konsultasi gratis mengenai hak kekayaan intelektual, termasuk yang berkaitan dengan pendaftaran desain industri.¹⁶ Kemenkumham menyediakan layanan informasi dan konsultasi melalui Kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Direktorat HKI) yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Selain itu, pemohon juga dapat mengakses informasi dan layanan konsultasi melalui situs resmi Direktorat HKI Kemenkumham. Layanan konsultasi gratis ini dapat membantu pemohon dalam mengatasi berbagai kendala dan kesulitan dalam proses pendaftaran desain industri, seperti memastikan persyaratan dokumen dan spesifikasi teknis produk, menjawab pertanyaan seputar hak-hak kekayaan intelektual, dan memberikan saran guna meningkatkan perlindungan hukum atas kekayaan intelektual yang dimiliki. Sebagai pemohon, sangat disarankan untuk memanfaatkan layanan informasi dan konsultasi tersebut guna memastikan kesuksesan dalam mendapatkan perlindungan hukum dan kekayaan intelektual yang dimiliki di bidang desain industri. Sehingga masyarakat yang mau mendaftarkannya bisa mendatangi ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM daerah atau langsung mencari informasi di situs resmi Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual di Kementerian Hukum dan HAM.

16 <https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel/djki-berikan-layanan-konsultasi-ki-gratis-pada-merek-festival-2023?kategori=liputan-humas> diakses pada tanggal 28 Maret 2024

IV. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan yaitu (1) Kain Songket Bali dilindungi oleh undang-undang hak cipta, dengan hak kekayaan intelektual (HKI) memastikan hak eksklusif bagi pengrajin untuk menghasilkan karya asli. Perlindungan ini menghambat pembajakan dan mendorong inovasi berkelanjutan. Namun, pemahaman hukum di masyarakat masih rendah, dan pengawasan terhadap produksi dan penjualan kain tradisional perlu ditingkatkan. Dampak pembajakan termasuk berkurangnya pendapatan bagi industri lokal, menghambat pertumbuhan industri, merusak citra merek, dan melemahkan upaya untuk melindungi HKI. Solusi alternatif untuk mempromosikan produk lokal antara lain inovasi produk, perlindungan HKI yang kuat, penegakan standar mutu dan pelabelan, perluasan jaringan distribusi, serta mengajak masyarakat untuk membudidayakan produk lokal. Pemerintah Indonesia memberikan perlindungan HKI terhadap kain tradisional melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, dan Undang-Undang Cagar Budaya Takbenda. Namun, efektivitas dalam melindungi kain tradisional dari pembajakan perlu ditingkatkan karena kepatuhan masyarakat yang rendah, sumber daya yang terbatas, dan pemahaman hukum yang rendah. (2) Kain tenun songket Bali, sebagai simbol warisan budaya, harus terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk perlindungan. Pendaftaran ini menawarkan beberapa manfaat, termasuk pengakuan resmi dari pemerintah, peningkatan keaslian dan kualitas, dan perlindungan hukum untuk hak cipta, penggunaan merek, dan penggunaan paten. Setelah pendaftaran, penting untuk membangun kesadaran, mengembangkan potensi desain dan teknik produksi, dan membuat rencana aksi untuk pelestarian, promosi, pengembangan,

dan peningkatan. Pemerintah dapat memberikan perlindungan hukum dan dukungan keuangan untuk produksi, perdagangan, dan promosi kain tenun songket Bali. Untuk menjamin kualitas dan kuantitas kain tenun songket Bali, perlu mempertahankan standar produksi yang baik, menggunakan bahan baku berkualitas tinggi, dan berpartisipasi dalam sertifikasi kualitas internasional. Maka penulis melalui tulisan ini menyampaikan saran kepada pihak masyarakat (1) Diberikan hak paten kepada pengrajin tenun songket Bali, Melindungi tenun songket Bali sebagai warisan budaya Indonesia Menetapkan regulasi khusus untuk perlindungan kekayaan intelektual kain tenun songket Bali, pemerintah memberikan jalan untuk masyarakat untuk menjalankan pendaftaran merek dagang untuk produk kain tenun songket Bali dan kesadaran masyarakat akan pentingnya melindungi hak kekayaan intelektual kain tenun songket Bali. (2) Kementerian Hukum dan HAM telah memberikan jalan agar masyarakat dapat mendaftarkan desain industri kain tenun Songket Bali nya. Kain Songket Bali memang memiliki keunikan tersendiri dan sangat layak untuk dijaga dan dilindungi hak ciptanya. Mendaftarkan desain industri kain tenun Songket Bali dapat memberikan beberapa manfaat bagi masyarakat dan pelaku industri kain Songket Bali mendapatkan Perlindungan Hukum Dengan mendaftarkan desain mereka, pemilik desain dapat memperoleh perlindungan hukum berupa hak eksklusif atas desainnya. Hal ini membantu mencegah orang lain meniru desain mereka tanpa izin, dan dapat mengurangi risiko pelanggaran hak cipta. Menambah Nilai Produk - Mendaftarkan desain industri kain tenun Songket Bali dapat menambah nilai produk. Konsumen akan lebih tertarik dengan produk yang memiliki nilai estetika unik dan eksklusif.

**DAFTAR BACAAN
BUKU**

- Muhammad, Abdulkadir, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Abdul Atsar, 2018, Mengenal Lebih dekat Hukum Kekayaan Intelektual, CV Budi Utama, Yogyakarta.
- Muhamad Djumhana dan Djubadillah, 2014, Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Farah Annisa, 2019. Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia dan hukum Internasional. LEX PRIVATUM 6 (7).
- Hery Firmansyah. 2018 Perlindungan Hukum terhadap Merek: panduan Memahami Dasar Hukum Penggunaan dan Perlindungan Merek. Media Presindo.
- Subroto, Muhammad Ahkmad, dan Suprapedi, HKI (Hak kekayaan Intelektual) Konsep Dasar Kekayaan Intelektual untuk Penumbuhan Inovasi, PT Index, Jakarta, 2008.
- Abdul Bari Azed, Kepentingan Negara Berkembang Sumber Daya Ginetik dan Pengetahuan Tradisional
- Budi Ahus Riswandi dan M sayamsuddin, HKI dan Budaya Hukum PT. radja Grafindo Persada Jakarta 2004
- Fadjar, A. Muktie. Perlindungan Hukum Unsur Esensial dalam Suatu Negara.

**PERATURAN PERUNDANG –
UNDANGAN**

Kitab Undang – Undang Hak Atas Kekayaan Intelektual

Peraturan Pemerintah Kementerian Hukum dan Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia

WEBSITE

Pangkalan Data Kekayaan Intelektual, 2024, Diakses Pada Tanggal 27 Maret 2024, <https://pdkiindonesia.dgip.go.id/detail/P00199600554?type=patent&keyword>

<https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel/bali-catatkan-kain-endek-dan-songket-sebagai-kekayaan-intelektual-komunal?kategori=ki-komunal> diakses pada tanggal 27 Maret 2024

<https://diskominfos.baliprov.go.id/workshop-pelestarian-kain-tenun-dan-songket-bali/> diakses pada tanggal 27 Maret 2024

<https://www.tenunbali.com/link/4-cara-bagaimana-melihat-kualitas-kain-tenun-yang-asli.html> diakses pada tanggal 27 Maret 2024

<https://bpsdm-dev.kemenkumham.go.id/informasi-publik/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/kekayaan-intelektual-desain-industri> diakses pada tanggal 28 Maret 2024

<https://dgip.go.id/menu-utama/desain-industri/syarat-prosedur> diakses pada tanggal 28 Maret 2024

<https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel/djki-berikan-layanan-konsultasi-ki-gratis-pada-merek-festival-2023?kategori=liputan-humas> diakses pada tanggal 28 Maret 2024